

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengaruh skeptisisme profesional, independensi, kompetensi, pelatihan auditor, dan risiko audit terhadap tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Di bawah ini akan diuraikan beberapa penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini beserta perbedaan dan persamaannya.

2.1.1 Aviani Sanjaya (2017)

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan. Variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan sebagai variabel dependen, sedangkan variabel independen yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah skeptisisme profesional, independensi, kompetensi, dan pelatihan auditor. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah analisis regresi berganda.

Penelitian tersebut menggunakan sampel auditor eksternal yang bekerja di KAP Semarang, dan telah bekerja minimal dua tahun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa independensi dan resiko audit berpengaruh signifikan terhadap tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan, namun skeptisisme profesional, kompetensi, dan pelatihan auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Persamaan:

1. Variabel dependen yang digunakan pada penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan.
2. Variabel independen yang digunakan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah skeptisisme profesional, independensi, kompetensi, pelatihan auditor, dan risiko audit.
3. Teknik analisis data pada penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah regresi linier berganda (*multiple regression*).

Perbedaan:

Partisipan yang digunakan berbeda yaitu penelitian terdahulu menggunakan semua auditor pada KAP di wilayah Bali. Sedangkan, peneliti sekarang menggunakan sampel KAP di wilayah Surabaya sebagai partisipan.

2.1.2 Kompiang Martina, Dewa Gede, dan I Putu Sudana (2017)

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh *fraud audit training*, skeptisisme profesional auditor, dan *audit tenure* pada kemampuan pendeteksian kecurangan. Variabel dependen yang digunakan pada penelitian tersebut adalah kemampuan pendeteksian kecurangan, sedangkan variabel independen yang digunakan pada penelitian tersebut adalah *fraud audit training*, skeptisisme profesional auditor, dan *audit tenure*. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian tersebut adalah regresi linier berganda.

Partisipan yang digunakan pada penelitian tersebut adalah auditor eksternal yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Bali. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa *fraud audit training*, skeptisisme profesional auditor, dan *audit tenure* berpengaruh positif pada kemampuan pendeteksian kecurangan.

Persamaan:

1. Variabel dependen yang digunakan pada penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah pendeteksian kecurangan.
2. Variabel independen yang digunakan pada penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah pelatihan auditor dan skeptisisme profesional auditor.
3. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah regresi linier berganda.

Perbedaan:

1. Variabel independen yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah *fraud audit training*, skeptisisme profesional auditor, dan *audit tenure*, sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan skeptisisme profesional, independensi, kompetensi, pelatihan auditor, dan risiko audit.
2. Partisipan yang digunakan berbeda yaitu pada penelitian terdahulu menggunakan auditor eksternal yang bekerja pada KAP di Bali, sedangkan penelitian sekarang menggunakan auditor eksternal yang bekerja pada KAP di Surabaya.

2.1.3 Andenna Pentaza Swastyami (2016)

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh karakteristik auditor dan risiko audit terhadap tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan. Variabel yang digunakan pada penelitian tersebut adalah tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan sebagai variabel dependen, sedangkan variabel yang

digunakan pada penelitian tersebut adalah independensi, kompetensi, risiko audit, dan kesadaran etis auditor terhadap tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian tersebut adalah analisis regresi berganda.

Penelitian tersebut menggunakan sampel auditor eksternal yang bekerja pada KAP yang berlokasi di kota Semarang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa independensi, kompetensi, dan risiko audit berpengaruh positif terhadap tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan. Namun, kesadaran etis tidak berpengaruh positif terhadap tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Persamaan:

1. Variabel dependen yang digunakan pada penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan.
2. Variabel independen yang digunakan pada penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah kompetensi, independensi, dan risiko audit.
3. Teknik analisis data penelitian terdahulu dan penelitian sekarang menggunakan regresi linier berganda.

Perbedaan:

1. Variabel independen yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah independensi, kompetensi, dan risiko audit, sedangkan variabel independen yang digunakan pada penelitian sekarang adalah skeptisisme profesional, independensi, kompetensi, pelatihan auditor, risiko audit.

2. Partisipan yang digunakan berbeda yaitu penelitian terdahulu menggunakan auditor eksternal yang bekerja pada KAP di Semarang, sedangkan penelitian sekarang menggunakan auditor eksternal yang bekerja pada KAP di Surabaya.

2.1.4 Siti Rahayu dan Gudono (2016)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh skeptisisme profesional, pelatihan audit, independensi, dan pengalaman terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Hasil analisis akan dihubungkan dengan pola pengambilan kebijakan dalam peningkatan kemampuan auditor dalam pendeteksian kecurangan. Variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini adalah kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, sedangkan variabel independen pada penelitian tersebut menggunakan skeptisisme profesional, pelatihan audit, independensi, dan pengalaman. Teknik analisis data kuantitatif dilakukan dengan model persamaan SEM (*Structural Equation Model*), sedangkan analisis kualitatif dibantu dengan analisis tematik.

Sampel yang digunakan meliputi auditor yang memiliki JFA (Jabatan Fungsional Auditor) di Kantor BPKP Kalimantan Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor independensi dan pelatihan auditor berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, sedangkan faktor skeptisisme profesional, keahlian profesional, dan pengalaman auditor tidak berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Persamaan:

1. Variabel dependen yang digunakan pada penelitian terdahulu dan penelitian sekarang menggunakan kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.
2. Variabel independen yang digunakan pada penelitian terdahulu dan sekarang menggunakan variabel skeptisisme profesional, pelatihan audit, independensi.

Perbedaan:

1. Variabel independen yang digunakan pada penelitian terdahulu menggunakan skeptisisme profesional, pelatihan audit, independensi, dan pengalaman, sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan variabel skeptisisme profesional, independensi, kompetensi, pelatihan auditor, dan risiko audit.
2. Penelitian terdahulu menggunakan metode riset campuran dengan desain sekuensial eksplanatif. Desain sekuensial eksplanatif sendiri adalah sebuah desain yang lebih mengutamakan penelitian kuantitatif untuk selanjutnya hasil penelitian kuantitatif tersebut digali lebih dalam dengan metode kualitatif, sedangkan peneliti sekarang hanya menggunakan menggunakan metode riset kuantitatif dengan menggunakan teknik analisis data regresi linier berganda.
3. Partisipan yang digunakan pada penelitian terdahulu menggunakan auditor yang bekerja di BPK Perwakilan Kalimantan Barat, sedangkan penelitian sekarang menggunakan auditor eksternal yang bekerja pada KAP di Surabaya.

2.1.5 Febrina Ramadhany (2015)

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pengalaman, independensi, skeptisisme profesional, kompetensi, dan komunikasi interpersonal auditor KAP terhadap pendeteksian kecurangan. Variabel dependen yang

digunakan pada penelitian tersebut adalah pendeteksian kecurangan, sedangkan variabel independen yang digunakan adalah pengalaman, independensi, skeptisme profesional, kompetensi, dan komunikasi interpersonal auditor KAP. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian tersebut adalah regresi linier berganda.

Sampel yang digunakan pada penelitian tersebut adalah auditor eksternal yang bekerja pada KAP di kota Pekanbaru, Medan, dan Batam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman, independensi, skeptisme profesional, kompetensi, dan komunikasi interpersonal auditor KAP berpengaruh signifikan terhadap pendeteksian kecurangan.

Persamaan:

1. Variabel dependen yang digunakan pada penelitian terdahulu dan penelitian sekarang menggunakan pendeteksian kecurangan
2. Variable independen yang digunakan pada penelitian terdahulu dan penelitian sekarang menggunakan independensi, skeptisisme profesional, dan kompetensi.
3. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian terdahulu dan penelitian sekarang menggunakan analisis regresi berganda.

Perbedaan:

1. Variabel independen yang digunakan pada penelitian terdahulu menggunakan pengalaman, independensi, skeptisme profesional, dan komunikasi interpersonal auditor KAP, sedangkan penelitian sekarang menggunakan skeptisme profesional, independensi, kompetensi, pelatihan auditor, dan risiko audit.

2. Sampel yang digunakan pada penelitian terdahulu menggunakan auditor eksternal yang bekerja pada KAP di kota Pekanbaru, Medan, dan Batam, sedangkan penelitian sekarang menggunakan auditor eksternal yang bekerja pada KAP di kota Surabaya.

2.1.6 Lingga Sulistyowati dan Supriyati (2015)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengalaman, kompetensi, independensi, dan profesionalisme auditor terhadap pendeteksian kecurangan. Variabel dependen yang digunakan pada penelitian tersebut menggunakan pendeteksian kecurangan. Variabel independen yang digunakan pada penelitian tersebut menggunakan pengalaman, kompetensi, independensi, dan profesionalisme auditor terhadap pendeteksian kecurangan. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian tersebut menggunakan analisis regresi berganda.

Sampel yang digunakan pada penelitian tersebut menggunakan auditor eksternal yang bekerja pada KAP di Kota Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengalaman, kompetensi, dan profesionalisme berpengaruh signifikan terhadap pendeteksian kecurangan, sedangkan variabel independensi tidak berpengaruh signifikan terhadap pendeteksian kecurangan.

Persamaan:

1. Variabel dependen yang digunakan pada penelitian terdahulu dan penelitian sekarang menggunakan kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.
2. Variabel independen yang digunakan pada penelitian terdahulu dan penelitian sekarang menggunakan kompetensi dan independensi.

3. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian terdahulu dan penelitian sekarang menggunakan analisis regresi berganda.
4. Partisipan yang digunakan pada penelitian terdahulu dan sekarang menggunakan auditor eksternal yang bekerja pada KAP di Surabaya.

Perbedaan:

Perbedaan pada penelitian ini terletak pada variabel independen yang digunakan. Penelitian terdahulu menggunakan variabel independen pengalaman, kompetensi, independensi, dan profesionalisme, sedangkan penelitian sekarang menggunakan variabel independen skeptisisme profesional, independensi, kompetensi, pelatihan auditor, dan risiko audit.

2.1.7 Sandi Prasetyo (2015)

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh *red flags*, skeptisisme profesional auditor, kompetensi, independensi, dan profesionalisme terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Variabel dependen yang digunakan pada penelitian tersebut menggunakan kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, sedangkan variabel independen yang digunakan pada penelitian ini adalah *red flags*, skeptisisme profesional auditor, independensi, dan profesionalisme. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian tersebut menggunakan analisis regresi berganda.

Penelitian tersebut menggunakan sampel auditor eksternal yang bekerja pada KAP di Pekanbaru, Padang, dan Medan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel *red flags*, skeptisisme profesional auditor, kompetensi, dan profesionalisme auditor berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam

mendeteksi kecurangan, sedangkan variabel independensi tidak berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Persamaan:

1. Variabel dependen yang digunakan pada penelitian terdahulu dan penelitian sekarang menggunakan kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.
2. Variabel independen yang digunakan pada penelitian terdahulu dan penelitian sekarang menggunakan skeptisme, kompetensi, dan independensi auditor.
3. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian terdahulu menggunakan regresi linier berganda.

Perbedaan:

1. Variabel dependen yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah *red flags*, skeptisme profesional auditor, kompetensi, independensi, dan profesionalism, sedangkan penelitian sekarang menggunakan variabel skeptisime profesional, independensi, kompetensi, pelatihan auditor, risiko audit.
2. Partisipan yang digunakan pada penelitian terdahulu menggunakan auditor eksternal yang bekerja pada KAP di Pekanbaru, Padang, dan Medan, sedangkan penelitian sekarang menggunakan sampel auditor eksternal yang bekerja pada KAP di Surabaya.

2.1.8 Elly Suryani dan Vanya Ayu Helvinda (2012)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengalaman, risiko audit, dan keahlian audit terhadap pendeteksian kecurangan oleh auditor. Variabel yang digunakan pada penelitian tersebut adalah pendeteksian kecurangan oleh auditor sebagai variabel dependen, sedangkan variabel independen yang

digunakan pada penelitian tersebut adalah pengalaman, risiko audit, dan keahlian audit. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian tersebut adalah analisis regresi berganda.

Penelitian tersebut menggunakan sampel auditor eksternal yang bekerja pada KAP di kota Bandung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengalaman dan kompetensi berpengaruh signifikan terhadap pendeteksian kecurangan oleh auditor, sedangkan risiko audit tidak berpengaruh signifikan terhadap pendeteksian kecurangan oleh auditor.

Persamaan:

1. Variabel dependen yang digunakan pada penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah pendeteksian kecurangan.
2. Variabel independen yang digunakan pada penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah keahlian audit/kompetensi dan risiko audit.
3. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah analisis regresi berganda.

Perbedaan:

1. Variabel independen yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah pengalaman, risiko audit, dan keahlian audit, sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan kompetensi/keahlian audit, independensi, skeptisisme profesional, pelatihan auditor, dan risiko audit.
2. Partisipan yang digunakan berbeda yaitu pada penelitian terdahulu menggunakan auditor eksternal yang bekerja pada KAP di kota Bandung,

sedangkan penelitian sekarang menggunakan auditor eksternal yang bekerja pada KAP di kota Surabaya.

Tabel 2.1

Matriks Penelitian Terdahulu

PENELITI	SKEPTISIME PROFESIONAL	INDEPENDENSI	KOMPETENSI	PELATIHAN AUDITOR	RISIKO AUDIT
Aviani Sanjaya (2017)	TB	B	TB	TB	B
Kompiang Martina dkk. (2017)	B			B	
Andenna Pentaza (2016)		B	B		B
Siti Rahayu & Gudono (2016)	TB	B	TB	B	
Febrina Ramadhany (2015)	B	B	B		
Lingga & Supriyati (2015)		TB	B		
Sandi Prasetyo (2015)	B	TB	B		
Elly & Vanya (2012)			B		TB

Sumber: Olahan Peneliti (2018)

Keterangan:

B : Berpengaruh

TB : Tidak Berpengaruh

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori ini dikemukakan oleh Michael C. Jensen dan William H. Meckling pada tahun 1976. Teori agensi merupakan sebuah teori yang memberikan penjelasan mengenai hubungan agensi, yaitu prinsipal (*principal*) dan agen (*agent*). Hubungan agensi ini dikenal sebagai suatu kontrak dimana suatu pihak yang berkedudukan sebagai prinsipal mengikat pihak lain yang berkedudukan sebagai agen untuk melaksanakan suatu pekerjaan bagi kepentingan prinsipal, yang disertai

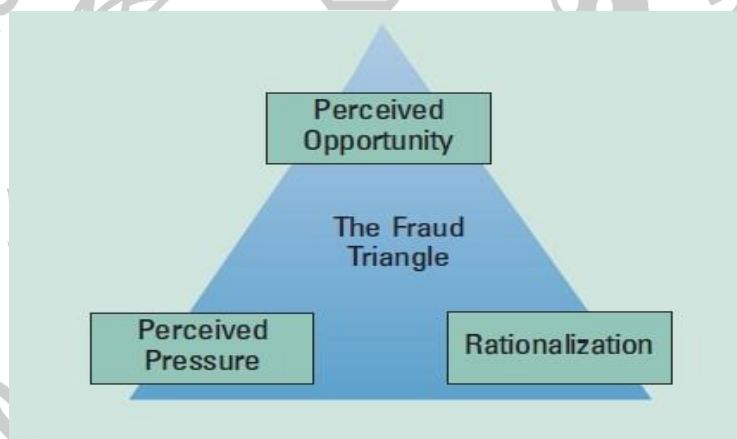
dengan pendelegasian wewenang pengambilan keputusan oleh prinsipal kepada agen. Pemisahan ini bertujuan untuk menciptakan efisiensi dan efektifitas dengan menyewa pihak yang profesional untuk mengelola perusahaan, tetapi pemisahan ini ternyata menimbulkan permasalahan. Permasalahan muncul ketika terjadi ketidak samaan tujuan antara pemilik perusahaan (*principal*) yang dalam hal ini *stockholder* dan manajemen (*agent*) serta lebih cenderung terjadinya asimetris informasi (ketidaksamaan informasi yang didapatkan atau yang diperoleh) antara pemilik perusahaan (*principal*) dan manajemen (*agent*) sehingga memungkinkan terjadinya penyelewengan yang dilakukan oleh manajemen.

Laporan keuangan merupakan suatu alat yang digunakan manajemen atau perusahaan untuk menarik investor yang potensial, jadi tidak heran bahwa laporan keuangan yang telah terdaftar di persiapkan perusahaan nominalnya dibuat untuk memanipulasi bahkan melakukan kecurangan. Nominal yang diinformasikan seharusnya mengindikasikan kondisi sebenarnya suatu perusahaan. Audit dibutuhkan untuk alat pengawasan dan alat untuk meyakinkan bahwa laporan keuangan harus bergantung pada pemeriksaan aspek-aspek *internal control* (Sofyan, 2012:532).

Dalam masalah *agency* dibutuhkan pengawasan yang berkaitan dengan auditing, baik principal maupun agen yang diasumsikan sebagai orang yang memiliki rasionalitas ekonomi. Dimana setiap tindakan dilakukan dengan adanya motivasi pribadi tanpa melihat kepentingan orang lain. Oleh karena itu dibutuhkan adanya pengalaman, kompetensi, independensi, dan skeptisisme auditor dalam memantau dan memeriksa aktivitas oleh pihak-pihak yang ingin berbuat curang.

2.2.2 Teori Segitiga Kecurangan (*Fraud Triangle Theory*)

Teori ini diperkenalkan pertama kali oleh Cressey pada tahun 1950-an, saat itu Cressey melakukan penelitian dengan wawancara terhadap narapidana terkait perilaku penggelapan dan penipuan, hasil penelitiannya itulah memunculkan sebuah konsep segitiga kecurangan (Dorminey et al., 2010 dalam Siti Rahayu dan Gudono, 2016) menyebutkan bahwa teori segitiga kecurangan menceritakan tentang orang atau pelaku kecurangan melakukan tindakan penipuan dan pencurian disebabkan karena tiga keadaan yaitu karena adanya tekanan (*perceived pressure*), kesempatan (*perceived opportunity*), rasionalisasi (*rationalization*).



Sumber: Siti Rahayu & Gudono (2016)

Gambar 2.1
Teori Segitiga Kecurangan

Berdasar gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa teori segitiga kecurangan menceritakan orang atau pelaku kecurangan melakukan tindakpenipuan dan pencurian disebabkan akaren tiga keadaan yaitu: 1) tekanan; 2) kesempatan; dan 3) pembenaran.

1. **Tekanan** (*pressure*) merupakan dorongan yang mencakup gaya hidup, tuntutan ekonomi yang dapat membuat seseorang melakukan tindak

kecurangan. Terdapat beberapa faktor tekanan yang mampu mempengaruhi, yaitu: (Romanus, 2014:280)

- a. **Tekanan keuangan** dimana menurut Albrecht *et al.* (2009) bahwa 95% kecurangan terjadi karena tekanan keuangan yang umumnya memiliki sifat serakah, pola hidup yang melebihi pendapatan, memiliki hutang yang besar, kerugian keuangan pribadi dan kebutuhan uang yang tidak terduga.
- b. **Tekanan kelemahan moral** terjadi setelah adanya tekanan keuangan sehingga memotivasi karyawan untuk melakukan kecurangan. Bentuk-bentuk kelemahan moral ini antara lain adalah suka berjudi, pemabok, serta mengalami perceraian keluarga..
- c. **Tekanan terkait pekerjaan**, hal ini mampu menimbulkan kecurangan dikarenakan adanya ketidakpuasan dalam pekerjaan, rendahnya pengakuan atas hasil kerja yang telah dilakukan, ketakutan dalam kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya, serta anggapan gaji yang diterima terlalu rendah dapat memotivasi seseorang untuk menekan atau mendorong seorang karyawan untuk melakukan kecurangan.
- d. **Tekanan lain**, bentuk-bentuk tekanan lain ini bermacam-macam. Sifat pasangan istri atau suami yang boros dan suka hidup bermewah-mewah dapat mendorong seorang karyawan melakukan kecurangan.

2. **Peluang atau Kesempatan** (*opportunity*) merupakan situasi yang dapat memungkinkan seseorang melakukan tindak kecurangan.

Terdapat beberapa peluang yang bisa terjadi, antara lain: (Romanus, 2014:281)

- a. **Langkanya pengawasan**, dimana tidak adanya pengawasan dalam sebuah organisasi menjadi penyebab terbesar adanya kecurangan, menurut COSO (*Committee of Sponsoring Organizations*) terdapat lima unsur kerangka pengendalian internal. Namun, dari kelima unsur yang paling penting adalah: 1) lingkungan pengendalian dari peranan manajemen perusahaan dan efektifitas dari departemen audit internal; 2) sistem akuntansi yang baik; 3) adanya kegiatan atau aktivitas pengawasan.
- b. **Ketidakmampuan untuk memutuskan kualitas kinerja**, bila hal ini terjadi maka para pemasok jasa, seperti penasehat hukum, akuntan, dokter serta jasa profesi lainnya, dapat melakukan manipulasi jasa yang diberikannya sebagai suatu kecurangan.
- c. **Kegagalan untuk mendisiplinkan pelaku kecurangan**, seseorang yang melakukan kecurangan kebanyakan adalah orang yang tidak disiplin dalam bekerja, sekalipun diberikan sanksi mereka tidak akan

jera. Oleh karenanya memberikan sikap disiplin kepada pelaku *kecurangan* merupakan hal yang tidak mudah. Sebaiknya dari awal perusahaan atau organisasi menerima karyawan yang memiliki sikap jujur serta berperilaku baik, dengan melakukan psiko test.

- d. **Langkanya akses informasi**, kebanyakan hal ini terjadi karena para penderitanya tidak memiliki akses atas informasi yang dimiliki oleh pelaku kecurangan. Hal ini sering terjadi pada kasus kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk kecurangan laporan keuangan. Korban dalam hal ini umumnya adalah pemegang saham, investor serta kreditor yang memang tidak memiliki akses informasi dalam perusahaan.
- e. **Ketidaktahuan, sikap apatis, atau tidak mampu**, seringkali korban kecurangan adalah orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan, bersikap apatis serta tidak mampu untuk mengenali bahwa mereka sedang dimanfaatkan oleh pelaku kecurangan.
- f. **Langkanya tindakan pemeriksaan**, bila dalam suatu organisasi atau perusahaan sedikit sekali atau langka dilaksanakan pemeriksaan secara teratur, maka kemungkinan dan peluang terjadinya kecurangan akan semakin besar.

3. Pembeneran (*rationalization*), semua kejahatan dalam bentuk kecurangan melibatkan unsur pembeneran. Banyak para pelaku kejahatan kecurangan pada awalnya adalah bukan pelaku kejahatan. Oleh karenanya mereka harus mencari pembeneran atas tindak kejahatan yang dilakukannya.

Untuk meminimalisir terjadinya kecurangan, seorang auditor harus mampu memahami terlebih dahulu tentang segitiga kejahatan. Hal ini menuntut auditor untuk dapat melakukan tugasnya dalam memahami kegiatan usaha dan bisnis serta mengidentifikasi terjadinya kecurangan. Kecurangan yang seringkali dilakukan diantaranya adalah memanipulasi pencatatan laporan keuangan, membuat faktur palsu, pengakuan pendapatan secara premature, penghilangan dokumen, dan *mark-up* laba yang dapat merugikan perekonomian negara (Marcellina dan Sugeng, 2009).

2.2.3 Kecurangan (*Fraud*)

Istilah *fraud* (Inggris) atau *fraude* (Belanda) yang sering diterjemahkan sebagai kecurangan. Definisi *fraud* berdasarkan *Black's Law Dictionary* yang dikutip dalam Fitrawansyah (2014:8) adalah:

“Fraud is (1) A knowing misrepresentation of the truth or concealment of a material fact to induce another to act to his or her detriment; is usual a tort, but in some cases (esp. When the conduct is willfull it may be a crime, (2) A misrepresentation made recklessly without belief in its truth to induce another person to act, (3) A tort arising from knowing misrepresentation, concealment of material fact, or reckles misrepresentation made to induce another to act to his or her detriment”

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa setidaknya ada tiga elemen fundamental dalam kecurangan (*fraud*), yaitu: (1) kecurangan dilakukan seseorang dengan sengaja, (2) kecurangan berbentuk menyembunyian fakta atau penipuan atau pemaksaan, dan (3) kecurangan bertujuan untuk memperoleh keuntungan pihak-pihak tertentu.

ACFE (*Association Certified Fraud Examiners*) pada tahun 2011 menyatakan bahwa kecurangan (*fraud*) dan kejahatan kerah putih (*white collar crime*) memiliki kesamaan istilah didalamnya. Berdasarkan pada definisi dari ACFE (2012), kecurangan terbagi menjadi tiga kelompok seperti berikut ini:

1. **Korupsi** (*corruption*), kegiatan/aktivitas dimana seorang karyawan secara tidak benar menggunakan kewenangannya dalam organisasi untuk transaksi bisnis yang dilakukan, agar mendapatkan keuntungan baik secara langsung atau tidak langsung. Tindakan korupsi yang terdiri dari beberapa hal, antara lain: (Romanus, 2014 : 274-276)
 - a. **Benturan kepentingan** (*conflict of interest*), bentuk korupsi yang berupa keadaan yang menimbulkan risiko dimana pertimbangan atau

tindakan yang profesional yang berkaitan dengan kepentingan yang utama, terpengaruh secara tidak wajar oleh kepentingan yang kedua dan selanjutnya. Hal ini terjadi pada skema penjualan barang dan jasa atau pada skema proses pembelian suatu barang dan jasa.

- b. **Penyuapan** (*bribery*), bentuk korupsi yang berupa tindakan yang menyiratkan pemberian uang atau hadiah untuk menyebabkan perubahan perilaku dari penerima dengan maksud untuk mempengaruhi tindakan dari seorang pejabat atau orang lain yang berkaitan dengan jabatan publik atau hukum.
 - c. **Gratifikasi ilegal** (*illegal gratuities*), bentuk korupsi yang berupa pemberian sejumlah uang tertentu atau pemberian bentuk yang lain yang diberikan kepada pejabat sektor publik atas layanan yang akan diberikan atau telah diberikan.
 - d. **Pemerasan** (*economic extortion*) merupakan tindakan kriminal yang bertentangan dengan hukum, hal ini dapat dilakukan dengan cara pengiriman *blackmail*, dan atau melalui pengeledahan secara ilegal.
2. **Penyalahgunaan Kekayaan** (*asset misappropriation*) merupakan kejahatan yang dilakukan oleh karyawan di suatu perusahaan yang melanggar aturan perusahaan serta merugikan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Tanda-tanda dari penyalahgunaan kekayaan yang penting, dapat dijelaskan sebagai berikut: (Romanus, 2014:27-278)
- a. **Skimming**, hal ini merupakan bentuk penyalahgunaan kekayaan yang dilakukan dengan mengambil kekayaan organisasi sebelum dicatat dalam pembukuan.
 - b. **Cash Larceny**, hal ini dilakukan ketika persediaan telah dicatat dalam pembukuan perusahaan.
 - c. **Shell Company**, pelaku kecurangan membuat perusahaan fiktif untuk mengalihkan uang perusahaan kepada dirinya sendiri atau kelompoknya.
 - d. **Karyawan Fiktif** (*Ghost Employee*), tindakan ini dilakukan pelaku dengan menambahkan karyawan fiktif pada file gaji. Selanjutnya pelaku

mengelola pembayaran gaji dari karyawan fiktif tersebut untuk dirinya sendiri atau kelompoknya.

- 3. Kecurangan Laporan Keuangan** (*financial statement fraudulent*) dimana seorang karyawan secara sengaja atau dengan kelalaian yang disengaja untuk melakukan salah saji atau menghilangkan informasi baik itu secara material ataupun tidak dalam laporan keuangan organisasi. Seorang pelaku kecurangan dalam laporan keuangan dapat melakukannya dengan cara memperkecil hutang, biaya dan kerugian untuk dapat membayar pajak lebih kecil, juga dapat memperbesar pendapatan, laba dan aktiva untuk menarik minat investor atau kreditur.

Terdapat beberapa alasan utama melakukan kecurangan dalam laporan keuangan, antara lain (Romanus, 2014:267):

- a. Menarik investor dengan saham yang dijual,
- b. Menunjukkan pada investor bahwa laba perusahaan meningkat,
- c. Menutupi ketidak mampuan pengelolaan perusahaan untuk mengumpulkan investasi,
- d. Memperoleh persayatan dana lebih rendah,
- e. Menunjukkan tercapainya tujuan atau sasaran organisasi.

ISA (*International Standart on Auditing*) 240.11 menyatakan bahwa kecurangan merupakan perbuatan yang disengaja oleh seseorang atau beberapa orang di antara manajemen, TCWG (*those charged with governance*), pegawai, atau pihak ketiga, dengan menipu untuk memperoleh keuntungan yang tidak dapat

dibenarkan atau keuntungan yang tidak sah/melawan hukum (Tuanakotta, 2014:308).

Fraud adalah satu jenis tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh sesuatu dengan cara menipu. *Fraud* mencakup perbuatan melanggar hukum dan pelanggaran terhadap peraturan dan perundangan yang dilakukan dengan sengaja demi keuntungan atau kerugian suatu organisasi oleh orang dalam atau juga diluar organisasi (Widya dkk, 2014).

Seorang auditor dalam menjalankan tugasnya dituntut melaksanakan tanggung jawab dengan baik terutama dalam mendeteksi kecurangan seperti yang tertera dalam Standar Profesional Akuntan Publik, SA 240 (Tanggung Jawab Auditor Terkait dengan Kecurangan dalam Suatu Audit atas Laporan Keuangan) dan Standar Profesional Akuntan Publik SA 200 (Tujuan Keseluruhan Auditor Independen dan Pelaksanaan Audit Berdasarkan Standar Audit). Tanggung jawab pendeteksian kecurangan (*fraud detection*) akan mendukung terwujudnya penerapan standar yang memadai untuk menunjang tanggung jawab pendeteksian kecurangan, membantu terwujudnya lingkungan kerja audit, metode dan prosedur audit yang cukup efektif untuk tanggung jawab pendeteksian kecurangan sehingga tidak terjadi kegagalan audit (Aviani, 2017).

4. Contoh - Contoh Kasus Kecurangan

a. Skandal Manipulasi Laporan Keuangan PT. Kimia Farma Tbk (2002)

PT Kimia Farma adalah salah satu produsen obat-obatan milik pemerintah di Indonesia. Pada audit tanggal 31 Desember 2001, manajemen Kimia Farma melaporkan adanya laba bersih sebesar Rp 132 milyar, dan laporan

tersebut di audit oleh Hans Tuanakotta & Mustofa (HTM). Akan tetapi, Kementerian BUMN dan Bapepam menilai bahwa laba bersih tersebut terlalu besar dan mengandung unsur rekayasa. Setelah dilakukan audit ulang, pada 3 Oktober 2002, laporan keuangan Kimia Farma 2001 disajikan kembali, karena telah ditemukan kesalahan yang cukup mendasar. Pada laporan keuangan yang baru, keuntungan disajikan 24,7% dari laba awal yang dilaporkan. Kesalahan penyajian yang berkaitan dengan persediaan timbul karena nilai yang ada dalam daftar harga persediaan digelembungkan. Direktur PT Kimia Farma menerbitkan dua buah daftar harga persediaan pada tanggal 1 dan 3 Februari 2012. Daftar harga tersebut digelembungkan nilainya dan dijadikan dasar penilaian persediaan pada unit distribusi Kimia Farma. Sedangkan kesalahan penyajian berkaitan dengan penjualan adalah dengan dilakukannya pencatatan ganda atas penjualan. Pencatatan ganda tersebut dilakukan pada unit-unit yang tidak disampling oleh akuntan, sehingga tidak berhasil dideteksi.

b. Skandal Keuangan Perusahaan Toshiba (2015)

Pada bulan Mei 2015, Toshiba mengejutkan seluruh dunia saat menyatakan bahwa perusahaannya tengah melakukan investigasi atas skandal akuntansi internal dan harus merevisi perhitungan laba dalam 3 tahun terakhir. Pengumuman tersebut sangat tidak disangka karena Toshiba telah menjadi lambang perusahaan Jepang yang sangat kuat. Setelah diinvestigasi secara menyeluruh, diketahuilah bahwa Toshiba telah kesulitan mencapai target keuntungan bisnis sejak tahun 2008 dimana pada saat tengah terjadi krisis

global. Krisis tersebut juga melanda usaha Toshiba hingga akhirnya Toshiba melakukan suatu kebohongan melalui *accounting fraud* senilai 1.22 milyar dolar Amerika. Tindakan ini dilakukan dengan berbagai upaya sehingga menghasilkan laba yang tidak sesuai dengan realita. Terbongkarnya kasus ini diawali saat audit pihak ketiga melakukan investigasi internal terhadap keuangan perusahaan. Berdasarkan informasi tersebut diketahui bahwa manajemen perusahaan menetapkan target laba yang tidak realistis sehingga saat target tersebut tidak tercapai, pemimpin divisi terpaksa harus berbohong dengan memanipulasi data laporan keuangan.

c. Skandal British Telecom dan Price Waterhouse Cooper (2017)

Sejak awal triwulan kedua 2017 telah muncul isu terjadinya kecurangan akuntansi di salah satu lini usahanya di Italia. Modusnya adalah membesarkan penghasilan perusahaan melalui perpanjangan kontrak yang palsu dan *invoice*-nya serta transaksi yang palsu dengan *vendor*. Praktik ini sudah terjadi sejak tahun 2013. Dorongan untuk memperoleh bonus (*tantiem*) menjadi stimulus kecurangan akuntansi ini. Dampaknya kecurangan akuntansi penggelembungan laba ini menyebabkan British Telecom menurunkan GBP 530 juta dan memotong proyeksi arus kas selama tahun 2017 sebesar GBP 500 juta untuk membayar utang-utang yang disembunyikan (tidak dilaporkan). Sebagaimana skandal kecurangan akuntansi lainnya, kecurangan yang terjadi di British Telecom berdampak pada akuntan publiknya yaitu Price Waterhouse Coopers (PwC) yang merupakan kantor akuntan publik ternama di dunia dan termasuk *the big*

four. Kecurangan akuntansi ini gagal dideteksi PwC yang telah memiliki relasi selama 33 tahun. Justru kecurangan ini berhasil dideteksi oleh pelapor pengaduan (*whistleblower*) yang dilanjutkan dengan akuntansi forensik oleh KPMG.

2.2.4 Mendeteksi Kecurangan

Untuk mendeteksi kecurangan seorang auditor harus mengenal terlebih dahulu gejala-gejala terjadinya kecurangan. Gejala-gejala tersebut dapat membantu seorang auditor untuk mengetahui adanya kecurangan atau potensi terjadinya kecurangan. Gejala-gejala ini dibagi menjadi 6 kelompok, yaitu: (Romanus, 2014:292-300).

1. Anomali akuntansi

Gejala-gejala tindak kecurangan (*fraud*) dalam bentuk anomali akuntansi pada umumnya melibatkan permasalahan yang berkaitan dengan dokumen sumber, pencatatan di buku besar atau *ledger*. Gejala-gejala yang berkaitan dengan dokumen sumber adalah termasuk dokumen-dokumen seperti *check*, faktur penjualan, order pembelian, permintaan pembelian, serta laporan penerimaan barang. Adanya dokumen yang hilang, tanda tangan yang aneh pada dokumen, serta kesalahan pencatatan jurnal dapat memunculkan kekeliruan yang memungkinkan munculnya penggelapan atas kekayaan perusahaan.

2. Pengendalian internal yang lemah

Secara umum gejala-gejala dari pengendalian internal yang lemah dapat dilihat dari tidak adanya pemisahan tugas pada sebuah perusahaan, tidak adanya pengamanan secara fisik atas kekayaan perusahaan, tidak adanya pemeriksaan secara independen atau mandiri, tidak adanya otorisasi yang tepat atas dokumen atau kegiatan organisasi, tidak adanya dokumen atau catatan yang tepat dan benar, penolakan atas pengawasan yang ada, serta sistem akuntansi yang tidak memadai.

3. Anomali analisis

Gejala-gejala kecurangah dari hasil analisis adalah prosedur atau hubungan yang tidak lazim atau begitu tidak realistis untuk dapat dipercaya. Hal ini termasuk transaksi atau kejadian yang terjadi pada saat atau tempat yang aneh, termasuk prosedur, kebijakan, atau praktik yang aneh. Gejala-gejala ini termasuk transaksi dan jumlah yang begitu besar atau begitu kecil yang sering atau jarang sekali terjadi. Pada dasarnya gejala-gejala analitis ini menunjukkan adanya sesuatu yang luar biasa. Hal ini dapat dilihat pada

barang sisa yang meningkat tajam, terjadi memo debit atau memo kredit yang begitu banyak, keluar masuknya (*turnover*) pejabat eksekutif yang tinggi, dan berbagai hubungan laporan keuangan yang aneh.

4. Gaya hidup yang bermewah-mewahan

Para pelaku kecurangan lazimnya suka membeli mobil mewah, pakaian yang mahal, rumah baru yang eksklusif, serta berpariwisata ke tempat dengan sarana yang mahal. Mereka sering membeli perhiasan dan permata yang mewah. Di samping itu mereka sering mempunyai hubungan di luar nikah. Jarang sekali pelaku tindak kecurangan melakukan kegiatan kejahatannya untuk menyimpan hasil curiannya.

5. Perilaku yang tidak lazim

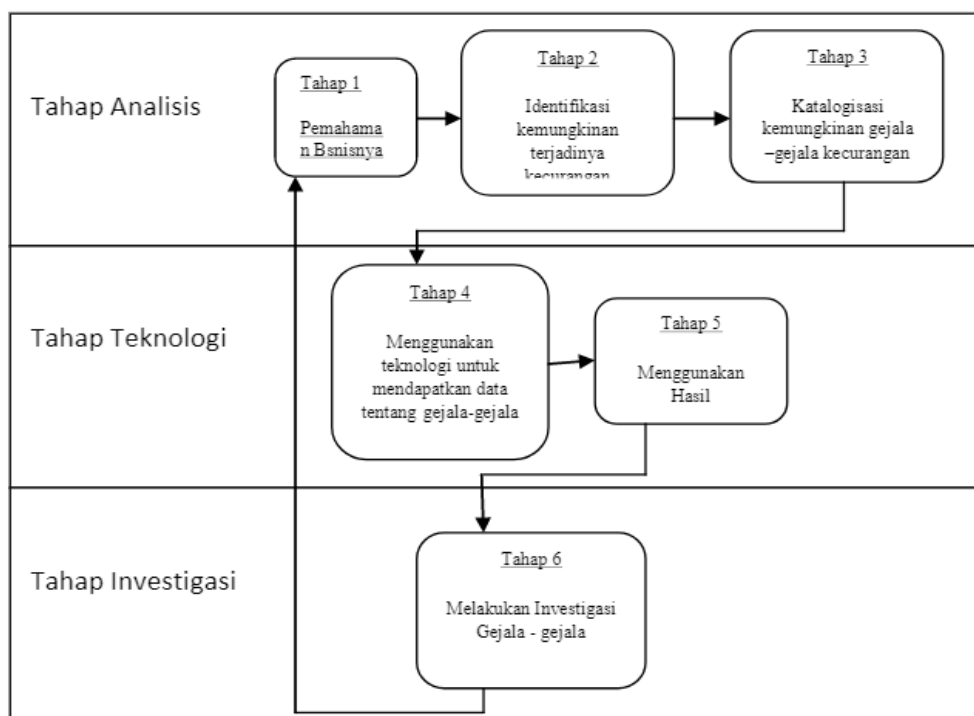
Berbagai penelitian psikologi menunjukkan bahwa seseorang yang melakukan kejahatan, (khususnya kecurangan) secara emosional menjadi sangat takut dan merasa bersalah. Emosi ini mengungkapkan adanya perasaan stress. Perubahan perilaku dari pelaku kecurangan diantaranya adalah pelaku sangat mudah marah, menjadi defensif serta suka berargumen, menjadi agresif dalam menyatakan pendapat, secara obsesif merenungkan konsekuensi tindakannya, berpikir untuk mencari alasan serta kambing hitam.

6. Laporan dan keluhan (*tips and complain*)

Para auditor sering dikecam karena tidak mendeteksi secara lebih sungguh-sungguh pada kasus kecurangan. Hal ini dikarenakan kecurangan yang sering kali mempersulit posisi auditor dalam mendeteksi terjadinya praktik tersebut. Semua tindak kecurangan dapat dideteksi dari tiga kejadian, yaitu:

- a. **Tindakan pencurian**, yang dapat disaksikan oleh seseorang bahwa pelaku melakukan pencurian uang kas atau aktiva lainnya;
- b. **Tindakan penyembunyian**, yang mengubah catatan atau melakukan kesalahan yang disengaja dalam menghitung uang kas atau aktiva lainnya;
- c. **Tindakan perubahan**, khususnya perubahan dalam gaya hidup pelakunya yang tidak terhindarkan, setelah mereka melakukan kecurangan.

Tindakan-tindakan tersebut tentu saja tidak akan diketahui oleh auditor, dikarenakan auditor hanya memeriksa pada saat tertentu. Oleh karenanya, yang paling tahu praktik kecurangan ini adalah rekan sekerja, atasan, maupun bawahan dari pelakunya. Salah satu cara yang baik agar laporan dan keluhan dapat disampaikan dengan benar serta dapat menjadi indikasi adanya tindak kecurangan adalah dengan menciptakan peraturan dan mekanisme *whistle blowing*.



Sumber: Romanus Wilopo (2014)

Gambar 2.2
Model Pendeteksian Kecurangan

Metode pendeteksian kecurangan (*fraud*) yang proaktif dapat diungkapkan pada gambar diatas dan dibahas oleh Romanus (2014:296-300):

1. Langkah Pertama: Memahami Kegiatan Usaha atau Bisnis

Metode pendeteksian kecurangan dimulai dengan memahami bisnis atau unit kerja yang diperiksa. Karena setiap lingkungan bisnis berbeda-beda, bahkan pada industri atau perusahaan yang sama, maka pendeteksian kecurangan sebagian besar merupakan proses analitis. Prosedur dalam mendeteksi kecurangan ini tidak digeneralisir untuk semua kegiatan usaha atau bahkan pada setiap unit kerja pada organisasi data perusahaan. Beberapa cara untuk memperoleh pemahaman atas kegiatan usaha atau bisnis adalah:

- a. Berkeliling ke tempat kerja, pabrik, atau departemen
- b. Paham dengan proses kegiatan yang dilakukan oleh pesaing
- c. Wawancara dengan personil kunci (bertanya kepada mereka dimana praktik kecurangan ditemukan)
- d. Melakukan analisis laporan keuangan serta informasi akuntan lainnya

- e. Mengkaji dokumentasi proses kegiatan usaha atau bisnis organisasi atau unit kerja
- f. Bekerja sama dengan auditor atau personil keamanan
- g. Mengamati para karyawan yang melaksanakan tugasnya

2. Langkah Kedua: Mengidentifikasi Kemungkinan Terjadinya Kecurangan

Proses identifikasi praktik kecurangan ini dimulai dengan membagi secara konseptual unit bisnis atau kegiatan usaha ke dalam fungsi atau siklus individual. Membagi atau mengelompokkan kegiatan usaha atau bisnis ke dalam masing-masing fungsi atau siklus membantu memfokuskan proses pendeteksian. Pada tahap ini auditor harus melakukan wawancara dengan orang yang terlibat pada kegiatan usaha atau bisnis di setiap fungsi. Selama tahapan ini, auditor harus melakukan *brainstorm* atau diskusi antar mereka tentang tipe atau pelaku kecurangan. Berbagai kemungkinan kecurangan harus dipertimbangkan, dan akhirnya harus dibuat daftar kemungkinan kecurangan serta diidentifikasi atau dipantau gejala-gejalanya.

3. Langkah Ketiga: Katalogisasi Kemungkinan Gejala-Gejala Kecurangan

Praktik *fraud* atau yang biasa disebut kecurangan umumnya jarang terlihat. Hanya gejala-gejala kecurangan sering kali pada akhirnya dapat dijelaskan dengan faktor-faktor non kecurangan, yang menimbulkan kebingungan, keterlambatan serta penambahan biaya yang harus dilakukan oleh auditor. Sebagai tambahan tidak ada bukti yang menyatakan bahwa banyaknya tanda-tanda itu akan meningkatkan kemungkinan adanya tindak kecurangan (*fraud*). Oleh karena itu, sebaiknya auditor membuat matriks, atau *brainstorm* yang akan menciptakan hubungan spesifik antar gejala-gejala tersebut dengan dugaan kecurangan.

4. Langkah Keempat: Menggunakan Teknologi untuk Mengumpulkan data tentang Gejala-Gejala

Setelah gejala-gejala ditemukan dan dikaitkan dengan praktik kecurangan tertentu, maka diperlukan dukungan data yang berasal dari database perusahaan, situs perusahaan, dan sumber-sumber yang lain. Termasuk dalam tahap ini adalah perolehan informasi dengan menggunakan penyadapan. Data dari komputer unit kerja serta sumber data lainnya dikumpulkan. Selanjutnya, data yang terkait dengan kemungkinan kecurangan dikumpulkan menjadi satu file atau folder, sedang yang tidak diperlukan dipisah.

5. Langkah Kelima: Menganalisis Hasil

Analisis hasil umumnya dilakukan atas anomali yang tidak dapat dijelaskan melalui analisis selanjutnya. Para auditor umumnya melakukan wawancara dengan rekan kerja pelaku perihal alasan terjadinya anomali. Kemudian memeriksa dokumen yang terkait dan melakukan wawancara dengan individu yang terkait. Beberapa cara untuk menemukan adanya kecurangan pada tahap ini antara lain dengan menemukan hal yang menyimpang, melakukan analisis digital, membuat stratifikasi dan penyimpulan.

6. Langkah Keenam: Menginvestigasi Gejala-Gejala

Lazimnya para pemeriksa menggunakan analisis komputer sebagai sarana untuk memberikan dukungan yang terinci. Berbagai perangkat lunak dapat digunakan untuk menginvestigasi gejala-gejala atau aktivitas kecurangan itu sendiri.

2.2.4 Auditor Eksternal

Menurut CEPA (*Comprehensive Economic Partnership Agreement*) 2012, maupun Kode Etik IAPI 2008, salah satu unsur dari akuntan profesional adalah akuntan yang berprofesi sebagai akuntan yang memeriksa laporan keuangan serta memberikan pendapat atau opini atas hasil pemeriksaan tersebut. Akuntan ini lazim disebut dengan auditor eksternal atau auditor independen.

Seperti pembahasan dalam buku Romanus (2014:102-103), pendapat atau opini dari auditor eksternal atas laporan keuangan ini merupakan hal yang sangat penting dan ditunggu oleh masyarakat atau para pemangku kepentingan dari entitas yang diperiksa. Hal ini dikarenakan pendapat atau opini tersebut merupakan salah satu alat yang penting dalam pengambilan keputusan. Bila opininya menjelaskan bahwa laporan keuangan itu disusun dan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi, berarti laporan keuangan tersebut menggambarkan kondisi operasi entitas secara wajar. Namun, bila pendapat tersebut menyatakan bahwa laporan keuangan tersebut tidak disajikan wajar sesuai dengan prinsip akuntansi, maka berarti laporan keuangan tersebut tidak memberikan gambaran kondisi operasi entitas yang wajar dan benar.

Permasalahan atau dilema bagi akuntan adalah karena yang membayar *fee* audit adalah klien, maka klien tersebut seringkali atau bahkan memaksakan agar pendapat atau opini atas laporan keuangan tersebut adalah wajar tanpa

pengecualian, meski sebenarnya tidak seperti itu. Oleh karenanya di dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai auditor eksternal seorang akuntan dibatasi dengan rambu-rambu kode etik auditor eksternal.

Berbeda dengan profesional yang lain, seorang auditor eksternal karena harus bekerja secara independen, maka dia mempunyai kegiatan yang berbeda. Auditor eksternal tidak saja mengevaluasi laporan kegiatan perusahaan, tetapi auditor harus memberikan penilaian apakah laporan tersebut dicatat sesuai dengan prinsip akuntansi. Hasil evaluasi dan penilaian ini ditunggu oleh pemberi penugasan atau klien, khususnya oleh masyarakat atau pemangku kepentingan. Hasil evaluasi dan penilaian akan digunakan untuk pembuatan keputusan.

Tanggung jawab auditor eksternal atau lebih umum disebut akuntan publik adalah melakukan fungsi pengauditan atas laporan keuangan yang diterbitkan entitas (Al Haryono: 2014, 19). Pengauditan ini dilakukan pada perusahaan-perusahaan terbuka (perusahaan yang menjual sahamnya kepada masyarakat melalui pasar modal), perusahaan-perusahaan besar, dan juga pada perusahaan-perusahaan kecil, serta organisasi-organisasi yang tidak bertujuan mencari laba.

Saat ini keberadaan auditor eksternal atau yang biasa disebut akuntan publik di Indonesia di atur dalam Undang-Undang (UU) No. 5 tahun 2011 tentang akuntan publik. Menurut UU tersebut, akuntan publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari menteri keuangan untuk memberikan jasa akuntan publik di Indonesia. Bidang jasa akuntan publik meliputi: (Al Haryono: 2014, 19-20)

1. Jasa attestasi, yang meliputi:

- a. Jasa audit umum atas laporan keuangan

- b. Jasa pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif
- c. Jasa pemeriksaan atas pelaporan informasi keuangan proforma
- d. Jasa review atas laporan keuangan
- e. Jasa atestasi lainnya sebagaimana tercantum dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)

2. **Jasa non atestasi**, yang mencakup jasa yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, manajemen, kompilasi, perpajakan, dan konsultasi sesuai dengan kompetensi Akuntan Publik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.5 **Tanggung Jawab Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan**

Sebenarnya tanggung jawab akuntan, khususnya auditor dalam mendeteksi kecurangan telah diatur (Romanus, 2014:300). Namun, tanggung jawab auditor tersebut tidak pernah menjadi isu yang jelas dan penting bagi masyarakat, pemerintah, maupun bagi auditor sendiri. Para pembuat peraturan dan pemerintah telah mencoba untuk menetapkan tanggung jawab tersebut secara definitif, namun tugas tersebut tidak mudah. Tanggung jawab para auditor keuangan masih diragukan sejauh mana mereka secara legal dan profesional bertanggung jawab untuk mendeteksi kecurangan di saat mereka melakukan audit keuangan (Romanus, 2014:300-301).

Standar auditing (SA 200 Paragraf 11) menyatakan tujuan keseluruhan auditor adalah sebagai berikut: (Al Haryono, 2014:168)

“Dalam melaksanakan suatu audit atas laporan keuangan, tujuan keseluruhan auditor adalah: a) memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan oleh karena itu memungkinkan auditor untuk menyatakan suatu opini tentang apakah laporan keuangan disusun, dalam hal yang material, sesuai dengan kerangka laporan yang berlaku dan b)

melaporkan atas laporan keuangan dan mengomunikasikannya sebagaimana ditentukan oleh SA berdasarkan temuan auditor.”

Standar auditing membedakan dua tipe salah saji, yaitu kesalahan dan kecurangan (Al Haryono, 2014:173). Kedua tipe salah saji ini bisa material dan bisa juga tidak material. Kesalahan adalah salah saji dalam laporan keuangan yang tidak disengaja, sedangkan kecurangan adalah salah saji yang disengaja (Al Haryono, 2014:173).

Standar auditing tidak membedakan antara tanggung jawab auditor untuk mencari kesalahan dan kecurangan. Baik untuk kesalahan maupun kecurangan, auditor harus mendapat keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material. Standar juga mengakui bahwa kecurangan seringkali lebih sulit ditemukan karena manajemen atau karyawan yang melakukan kecurangan akan berusaha untuk menutupi kecurangan. Namun demikian, kesulitan untuk mendeteksi kecurangan tidak mengubah tanggung jawab auditor untuk merencanakan dan melaksanakan audit dengan tepat guna mendeteksi kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kesalahan maupun kecurangan (Al Haryono, 2014:174).

SA 240 (Paragraf 4) menyebutkan sebagai berikut: (Al Haryono, 2014:174)

“Tanggung jawab utama untuk pencegahan dan pendeteksian kecurangan berada pada dua pihak yaitu yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas dan manajemen. Merupakan hal penting atas tata kelola entitas dan manajemen, dengan pengawasan oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, menekankan pencegahan kecurangan, yang dapat mengurangi peluang terjadinya kecurangan, dan pencegahan kecurangan, yang dapat membujuk individu-individu agar tidak melakukan kecurangan karena kemungkinan akan terdeteksi dan terkena hukuman. Hal ini memerlukan komitmen untuk menciptakan budaya jujur dan perilaku etis yang dapat ditegakkan dengan pengawasan aktif oleh pihak yang bertanggung

jawab atas tata kelola. Pengawasan oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola meliputi pertimbangan tentang potensi pengesampingan pengendalian atau pengaruh tidak patut atas proses pelaporan keuangan seperti usaha manajemen untuk mengelola laba dengan tujuan untuk memengaruhi persepsi analisis kinerja dan probabilitas entitas.”

Paragraf 5 SA 240 menyebutkan: (Al Haryono, 2014:174)

“Auditor yang melaksanakan audit berdasarkan SA bertanggung jawab untuk memperoleh keyakinan memadai apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, yang disebabkan oleh kecurangan atau kesalahan. Karena keterbatasan bawaan suatu audit, maka selalu ada risiko yang tidak terhindarkan bahwa beberapa kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan mungkin tidak akan terdeteksi, walaupun audit telah direncanakan dan dilaksanakan dengan baik berdasarkan SA.”

Jika auditor menduga kemungkinan terjadi ketidakpatuhan, maka auditor harus membahas hal tersebut dengan manajemen dan, jika relevan, dengan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Jika manajemen atau, jika relevan, pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, tidak dapat memberikan informasi memadai yang mendukung kepatuhan entitas terhadap peraturan perundang-undangan dan, dalam pertimbangan auditor, dampak dugaan ketidakpatuhan tersebut material terhadap laporan keuangan, maka auditor harus mempertimbangkan keputusan untuk memperoleh *advice* hukum (Al Haryono, 2014:181).

Sesuai dengan SA 705, jika auditor menyimpulkan bahwa ketidakpatuhan berdampak material terhadap laporan keuangan, dan belum tercermin secara memadai dalam laporan keuangan, maka auditor dapat menyatakan suatu opini wajar dengan pengecualian atau suatu opini tidak wajar atas laporan keuangan tersebut (Al Haryono, 2014:182). Jika auditor dihalangi oleh manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk memperoleh bukti audit cukup dan

tepat untuk mengevaluasi apakah ketidakpatuhan yang mungkin berdampak material terhadap laporan keuangan telah atau kemungkinan telah terjadi, maka auditor harus menyatakan opini wajar dengan pengecualian atau pernyataan tidak memberikan opini atas laporan keuangan karena adanya pembatasan ruang lingkup audit (Al Haryono, 2014:182). Hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa tanggung jawab auditor adalah ketika dalam proses menemukan atau menentukan suatu tindak ilegal, auditor harus memperoleh keyakinan bahwa salah saji material secara sengaja tidak terjadi dalam pelaporan keuangan.

2.2.6 Skeptisisme Profesional

Skeptisisme profesional adalah suatu sikap yang mencakup suatu pikiran yang selalu mempertanyakan, waspada terhadap kondisi yang dapat mengindikasikan kemungkinan kesalahan penyajian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan penilaian penting atas bukti audit (Al Haryono, 2014:170). Skeptisisme profesional terdiri dari dua komponen utama, yaitu: 1) suatu pikiran yang selalu mempertanyakan dan 2) sikap waspada atau kritis dalam menilai bukti audit. Walaupun auditor bersikap percaya bahwa organisasi yang telah diterimanya sebagai klien memiliki integritas dan jujur, namun dengan selalu berpikiran mempertanyakan akan membantu auditor dalam menghilangkan bias alami untuk percaya kepada klien (Al Haryono, 2014:171).

Sikap selalu mempertanyakan adalah pendekatan audit auditor dengan pandangan mental “percaya tapi tetap memeriksa” (*trust but verify*). Demikian pula ketika mendapatkan dan mengevaluasi bukti pendukung tentang jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan, skeptisisme profesional juga meliputi

penilaian kritis atas bukti-bukti yang mencakup pertanyaan yang menyelidik dan perhatian terhadap kemungkinan inkonsistensi. Apabila auditor melaksanakan tanggung jawabnya dengan menjaga sikap berpikiran mempertanyakan dan secara kritis mengevaluasi bukti, auditor akan dapat mengurangi secara signifikan kegagalan audit selama audit berlangsung (Al Haryono, 2014:171).

Skeptisisme profesional mencakup kewaspadaan terhadap antara lain hal-hal sebagai berikut: (Al Haryono, 2014:171)

- Bukti audit yang bertentangan dengan bukti audit lain yang diperoleh
- Informasi yang menimbulkan pertanyaan tentang keandalan dokumen dan tanggapan terhadap permintaan keterangan yang digunakan sebagai bukti audit
- Keadaan yang mengindikasikan adanya kemungkinan kecurangan
- Kondisi yang menyarankan perlunya prosedur audit tambahan selain prosedur yang disyaratkan oleh SA.

Mempertahankan skeptisisme profesional selama audit diperlukan jika auditor berusaha untuk mengurangi seperti misalnya:

- Kegagalan dalam melihat kondisi-kondisi tidak lazim
- Terlalu menyamaratakan kesimpulan ketika menarik kesimpulan tersebut dari observasi audit
- Menggunakan asumsi yang tidak tepat dalam menetapkan sifat, saat, dan luas prosedur audit serta penilaian atas hasilnya

Adanya kegagalan audit disebabkan lemahnya sikap skeptisisme profesional yang dimiliki oleh auditor. Standar profesional akuntan publik

mendefinisikan skeptisisme profesional adalah sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit (Standar Profesional Akuntan Publik, SA seksi 230).

Institut Akuntan Publik Indonesia (2011) menjelaskan bahwa skeptisisme profesional auditor dipengaruhi banyak hal, seperti pengalaman, kesadaran etis, situasi audit, dan profesionalisme. Standar profesional menghendaki agar auditor tidak boleh mengasumsikan begitu saja bahwa manajemen adalah tidak jujur, tetapi juga tidak boleh mengasumsikan manajemen jujur.

Siti Rahayu dan Gudono (2016) menyimpulkan sikap skeptisisme profesional digunakan auditor ketika melaksanakan pengumpulan bukti audit dan evaluasi kecukupan bukti audit. Sikap ini bukan berarti menuntun auditor untuk bersikap tidak percaya dan menganggap audit berlalu tidak jujur pada saat pengumpulan dan evaluasi bukti. Tetapi sikap ini ditunjukkan dengan sikap auditor yang tidak mudah merasa puas dan cukup dengan bukti yang kurang meyakinkan yang diberikan oleh manajemen. Skeptisisme profesional sangat penting untuk dimiliki oleh auditor guna mendapatkan informasi yang kuat, yang akan dijadikan dasar bukti audit yang relevan yang dapat mendukung pemberian opini atas kewajaran laporan keuangan.

2.2.7 Independensi

Seorang auditor dalam menjalankan tugasnya, dituntut untuk bersikap independen dari pihak manapun. Menurut Widya, dkk (2014) dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, maka organisasi pemeriksa dan pemeriksa harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi,

ekstern, dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya. Febrina (2015) menjelaskan bahwa independensi merupakan sikap mental yang harus dipertahankan oleh auditor, jadi dalam menilai kewajaran suatu laporan keuangan seorang auditor tidak mudah dipengaruhi oleh pihak manapun. Selain itu independensi auditor membantu memelihara integritas dan efisiensi dalam laporan keuangan yang disajikan kepada lembaga keuangan untuk mendukung pemberi pinjaman dan kepada pemegang saham untuk memperoleh modal.

Independen artinya tidak mudah dipengaruhi karena auditor melaksanakan pekerjaan untuk kepentingan umum. Sikap independensi ditunjukkan dengan sikap bebas dari gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi yang diperkirakan dapat mempengaruhi keputusannya terkait hasil pemeriksaan (Siti Rahayu dan Gudono, 2016). Para akuntan tidak hanya harus mempertahankan sikap independen dalam memenuhi tanggung jawabnya, namun para pengguna laporan keuangan harus memiliki keyakinan atas independensi ini. Hayes *et. al* (2017:103) dalam bukunya menyebutkan bahwa ada dua sasaran yang seringkali seringkali diidentifikasi sebagai “independensi dalam pemikiran (*independence of mind*)” dan independensi dalam tampilan (*independence in appearance*):

1. Independensi dalam pemikiran (secara historis disebut sebagai independensi dalam fakta) muncul ketika akuntan dapat mempertahankan sikap yang jelas (tidak bias) selama proses audit, sehingga objektif dan tidak memihak (berimbang). Independensi dalam pemikiran mengizinkan akuntan profesional untuk bertindak dengan integritas, objektivitas, dan kewaspadaan profesional.

2. Independensi dalam tampilan merupakan hasil interpretasi orang lain atas independensi tersebut. Independensi dalam tampilan termasuk menghindari situasi situasi penting yang mana pihak ketiga yang layak mendapatkan informasi sedang mempertimbangkan seluruh fakta dan situasi yang ada untuk menyimpulkan bahwa integritas, objektivitas, atau kewaspadaan profesional dari auditor telah berjalan tidak semestinya.

Arens *et.al.*, (2011:74) menyatakan bahwa independensi audit berarti mengambil sudut pandang yang tidak bias dalam pengujian audit, mengevaluasi pengujian, dan mengeluarkan laporan audit. Independensi merupakan salah satu karakteristik yang paling penting bagi auditor dan berfungsi sebagai dasar prinsip integritas dan objektivitas. Jadi, dapat disimpulkan bahwa independensi merupakan suatu sikap yang harus dipertahankan auditor dalam menjalankan setiap tugasnya, yang tidak dibenarkan untuk memihak kepada siapapun.

2.2.8 Kompetensi

Seorang auditor agar dapat memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dalam melaksanakan penugasannya terutama dalam hal mendeteksi kecurangan, maka auditor harus memiliki kompetensi yang memadai dalam hal mendeteksi kecurangan sehingga dapat memaksimalkan hasil akhir audit dan meningkatkan tanggung jawab dalam mendeteksi kecurangan pada laporan keuangan. Pada pernyataan standar umum pertama dalam SPKN, dinyatakan bahwa pemeriksa secara kolektif harus memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan.

Aviani (2017) menyatakan bahwa kompetensi merupakan tolak ukur pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh auditor, pengetahuan yang dimiliki auditor diukur dari seberapa tinggi tingkat pendidikan yang sudah ditempuh, sedangkan pengalaman yang dimiliki auditor diukur dari seberapa dalam auditor melakukan penugasan audit. Lingga dan Supriyati (2015) mendefinisikan bahwa seorang auditor yang berkompoten (mempunyai keahlian) adalah orang yang dengan keterampilannya mengerjakan pekerjaan dengan mudah, cepat, dan intuitif dan sangat jarang atau bahkan tidak pernah membuat kesalahan.

Lingga dan Supriyati (2015) menyatakan bahwa kompetensi berkaitan dengan pendidikan dan pengalaman yang memadai dan dimiliki oleh auditor di bidang *auditing* dan *accounting*. Ketika melakukan audit, auditor harus bertindak sebagai ahli dalam bidang akuntansi dan audit. Pencapaian keahlian mulai dari pendidikan formal dan dikembangkan lebih jauh melalui pengalaman praktik dalam audit. Zua'amah (2009) dalam Lingga dan Supriyati (2015) menyimpulkan kompetensi auditor adalah keahlian profesional yang dimiliki oleh auditor sebagai hasil dari pendidikan formal, ujian profesional maupun keikutsertaan dalam pelatihan, seminar, simposium dan lain-lain seperti:

1. Ujian CPA (*Certified Public Accountant*) untuk luar negeri dan ujian SAP (Sertifikat Akuntan Publik) untuk di Indonesia,
2. PPB (Pendidikan Profesi Berkelanjutan),
3. Pelatihan intern dan ekstern,
4. Keikutsertaan dalam seminar, simposium, dan lain-lain.

Kompetensi auditor adalah auditor yang dengan pengetahuan dan pengalaman yang cukup dan eksplisit dapat melakukan audit secara objektif, cermat, dan seksama. Semakin banyak sertifikat yang dimiliki dan semakin sering

mengikuti pelatihan atau seminar diharapkan auditor yang bersangkutan akan semakin cakap dalam melaksanakan pekerjaan auditnya.

2.2.9 Pelatihan Auditor

Pelatihan auditor merupakan salah satu usaha untuk mengembangkan sumber daya manusia dalam bidang pengetahuan, kemampuan, keahlian, dan sikap (Aviani, 2017). Pelatihan yang sistematis dan berjenjang sesuai dengan tingkatan auditor, maka akan mempermudah auditor untuk melengkapinya kekurangan auditor dan memberikan penekanan pada praktik audit dan standar akuntansi bagi auditor.

Kecurangan atau *fraud* semakin marak terjadi dengan berbagai cara yang terus berkembang sehingga kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan perlu untuk terus ditingkatkan. Masalah yang timbul adalah auditor juga memiliki keterbatasan dalam mendeteksi kecurangan. Keterbatasan yang dimiliki auditor akan menyebabkan kesenjangan bagi pemakai jasa auditor yang berharap agar auditor dapat memberi keyakinan bahwa laporan keuangan yang disajikan tidak mengandung salah saji dan telah mencerminkan keadaan yang sebenarnya (Kompiang dkk, 2017).

Kompiang dkk, (2017) menyatakan bahwa dengan adanya pelatihan mungkin menyebabkan struktur pengetahuan auditor tentang kekeliruan akan bertambah. Melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman auditor akan menjadi ahli di bidang akuntansi dan pengauditan, serta memiliki kemampuan untuk menilai dan mempertimbangkan secara objektif dan tidak memihak terhadap informasi dalam pembukuan perusahaan atau informasi lain yang berhasil diungkapkan melalui auditnya. Pelatihan auditor memiliki fungsi-fungsi edukatif, administratif

dan profesional. Fungsi edukatif mengacu pada peningkatan kemampuan profesional, kepribadian, dedikasi dan loyalitas pada organisasi. Fungsi administrasi mengacu pada pemenuhan syarat-syarat administrasi, seperti promosi, dan pembinaan karir.

Siti Rahayu dan Gudono (2016) menyatakan bahwa pelatihan audit kecurangan dilaksanakan supaya auditor dapat memahami, menjelaskan, menguraikan, menjabarkan, dan mengimplementasikan teknik dan metode investigatif secara menyeluruh. Selain itu, pelatihan diberikan untuk meningkatkan kemampuan auditor dalam melaksanakan tugasnya mendeteksi kecurangan. Audit harus dilakukan oleh seseorang atau lebih yang memiliki kelebihan dan pelatihan teknis yang memadai. Melalui pelatihan teknis audit kecurangan, auditor akan mempelajari, dan memahami ketentuan baru, metodologi baru, teknik audit investigatif yang baru dalam mengungkapkan kasus kecurangan (Siti Rahayu dan Gudono, 2016).

Kurangnya pemahaman yang komprehensif tentang *fraud auditing* menjadi salah satu sebab tak terdeteksinya kasus-kasus yang terjadi di sebuah perusahaan atau organisasi. Hal tersebut membuktikan bahwa tidak semua auditor mengikuti pelatihan audit dapat mengungkap kecurangan di dalam laporan keuangan tersebut (Subhan, 2016). Pelatihan auditor mengenai deteksi kecurangan merupakan hal yang sangat dibutuhkan, karena dengan mengikuti pelatihan tersebut auditor dapat mengikuti perubahan teknis bagaimana kecurangan itu dilakukan dan perubahan lingkungan dimana kecurangan dapat dilakukan (Aviani, 2017).

2.2.10 Risiko Audit

Elly dan Vanya (2012) menjelaskan bahwa risiko audit merupakan risiko yang timbul karena auditor tanpa disadari tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya atas laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Salah saji material bisa terjadi karena adanya kesalahan (*error*) atau kecurangan (*fraud*). Aviani (2017) menyatakan bahwa penilaian atas risiko audit perlu dilakukan untuk menghindari kemungkinan risiko salah saji yang bersifat material yang bisa saja tidak terdeteksi.

Standar Audit (SA 200.13 (c)) mendefinisikan risiko audit sebagai berikut:

“Risiko bahwa auditor menyatakan suatu opini audit yang tidak tepat ketika laporan keuangan mengandung kesalahan penyajian material. Risiko audit merupakan suatu fungsi kesalahan penyajian material dan risiko deteksi.”

Dengan perkataan lain, risiko audit adalah ukuran tentang seberapa besar auditor bersedia untuk menerima bahwa laporan keuangan mungkin mengandung kesalahan penyajian material setelah audit selesai dikerjakan dan memberinya pendapat wajar tanpa pengecualian (Al Haryono, 2014:330). Apabila auditor memutuskan untuk menurunkan risiko audit, hal itu berarti bahwa auditor ingin lebih pasti bahwa laporan keuangan tidak mengandung kesalahan penyajian material.

Risiko audit memiliki 3 komponen yang diklasifikasi, yaitu: (Al Haryono, 2014:326)

1. Risiko Deteksi

Standar audit (SA 200. 13 (e)) mendefinisikan risiko deteksi sebagai berikut:

“Risiko deteksi adalah risiko bahwa prosedur yang dilaksanakan oleh auditor untuk menurunkan risiko audit ke tingkat rendah yang dapat diterima tidak akan

mendeteksi suatu kesalahan penyajian yang ada dan yang mungkin material, baik secara individual maupun secara kolektif ketika digabungkan dengan kesalahan penyajian lainnya.”

Dengan kata lain, risiko deteksi adalah risiko yang timbul karena bukti audit tidak berhasil mendeteksi kesalahan penyajian yang melebihi kesalahan penyajian yang bisa ditoleransi (atau disebut juga materialitas pelaksanaan). Ada dua hal yang perlu diketahui tentang risiko deteksi (atau lebih tepat disebut risiko deteksi yang direncanakan), yaitu: (Al Haryono, 2014:326)

- 1) Risiko deteksi merupakan dependen dari tiga faktor lain yang tercakup dalam mode. Risiko ini akan berubah hanya apabila auditor mengubah salah satu (atau lebih) faktor lain dalam model risiko.
- 2) Risiko deteksi menentukan jumlah bukti substantif yang direncanakan akan dikumpulkan auditor yang berkebalikan dengan ukuran risiko deteksi. Apabila risiko deteksi berkurang, auditor harus mengumpulkan bukti yang lebih banyak untuk mencapai risiko deteksi yang telah berkurang tersebut.

2. Risiko Inheren

Standar audit (SA 200.13 (n)) mendefinisikan risiko inheren sebagai berikut: (Al Haryono, 2014:327)

“Risiko inheren merupakan kerentanan suatu asersi tentang suatu golongan transaksi, saldo akun, atau pengungkapan terhadap suatu kesalahan penyajian yang mungkin material, baik secara individual maupun secara kolektif ketika digabungkan dengan kesalahan penyajian lainnya, sebelum mempertimbangkan pengendalian internal yang terkait.”

Dengan kata lain, risiko inheren adalah penilaian auditor mengenai kemungkinan adanya kesalahan penyajian material yang disebabkan karena kekeliruan atau kecurangan sebelum mempertimbangkan efektivitas

pengendalian internal. Apabila auditor berkesimpulan bahwa kemungkinan besar terdapat kesalahan penyajian, maka auditor akan berkesimpulan bahwa risiko inherennya tinggi. Pada saat mempertimbangkan risiko inheren, pengendalian internal akan dikesampingkan karena dalam model risiko audit, pengendalian internal dipertimbangkan tersendiri sebagai risiko pengendalian (Al Haryono, 2014:327).

3. Risiko Pengendalian

Standar audit (SA 200, 13 (n)) mendefinisikan risiko pengendalian sebagai berikut: (Al Haryono, 2014:328)

“Risiko pengendalian merupakan suatu kesalahan yang mungkin terjadi dalam suatu asersi tentang suatu golongan transaksi, saldo akun, atau pengungkapan yang mungkin material, baik secara individual maupun secara kolektif ketika digabungkan dengan kesalahan penyajian lainnya, tidak akan dapat dicegah, atau dideteksi dan dikoreksi, secara tepat waktu oleh pengendalian internal entitas.”

Dengan kata lain, risiko pengendalian mengukur penilaian auditor tentang apakah kesalahan penyajian yang melebihi jumlah kesalahan penyajian bisa ditoleransi pada suatu segmen akan dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh sistem pengendalian internal klien.

2.3 Pengaruh Antar Variabel

2.3.1 Pengaruh Skeptisisme Profesional terhadap Tanggung Jawab Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan

Sikap skeptisisme profesional auditor adalah sikap kritis yang selalu mempertanyakan keandalan bukti audit atau informasi yang diperoleh dari pihak klien. Dalam menjalankan sikap skeptisisme profesionalnya seorang auditor

cenderung tidak mudah mempercayai atau menyetujui manajemen tanpa bukti yang kuat (Aviani, 2017).

Menurut Sandi (2015) semakin tinggi sikap skeptisisme profesional yang dimiliki oleh seorang auditor maka semakin tinggi pula kemampuan seorang auditor dalam mendeteksi kecurangan. Dengan adanya sikap skeptisisme profesional yang dimiliki seorang auditor dalam penugasan auditnya, dapat membuat kemampuan mendeteksi kecurangan menjadi lebih baik.

2.3.2 Pengaruh Independensi terhadap Tanggung Jawab Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan

Independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, serta tidak tergantung pada pihak lain. Independensi merupakan salah satu faktor penting dalam proses audit, karena bila seorang auditor tidak menerapkan sikap independensinya, maka laporan keuangan yang diaudit tidak dapat dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan (Sandi, 2015).

Semakin tinggi sikap independensi yang dimiliki oleh seorang auditor maka semakin tinggi pula kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Seorang auditor yang memiliki sikap independensi dalam penugasannya, maka auditor tersebut bebas mengeluarkan opini audit tanpa tekanan dari pihak manapun sehingga memudahkannya dalam proses mendeteksi kecurangan (Sandi, 2015).

2.3.3 Pengaruh Kompetensi terhadap Tanggung Jawab Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan

Auditor yang memiliki kompetensi dalam hal pengetahuan, pengalaman, pendidikan, dan pelatihan yang memadai dapat melakukan audit secara objektif dan

akrual. Program pelatihan memiliki pengaruh lebih besar dalam meningkatkan keahlian auditor untuk melakukan audit. Pengalaman akan mempengaruhi kemampuan auditor mendeteksi adanya kecurangan di perusahaan kliennya. Keahlian audit dan kemampuan untuk mengetahui kecurangan merupakan bagian dari kompetensi seorang auditor (Lingga dan Supriyati, 2015).

Kompetensi merupakan kualifikasi yang harus dimiliki oleh seorang auditor untuk melaksanakan proses audit. Proses audit harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kelebihan dan pelatihan teknis yang cukup sebagai seorang auditor.

2.3.4 Pengaruh Pelatihan Auditor terhadap Tanggung Jawab Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan

Dengan adanya pelatihan yang sistematis dan berjenjang sesuai dengan tingkatan auditor, maka akan mempermudah auditor untuk melengkapi kekurangan auditor dan memberikan penekanan pada praktik audit dan standar akuntansi bagi auditor. Auditor membutuhkan berbagai keterampilan dan keahlian tertentu dalam meningkatkan kinerjanya terutama dalam mendeteksi kecurangan oleh sebab itu memerlukan adanya pelatihan melalui kursus-kursus pendidikan profesional lanjutan (Aviani, 2017).

Dengan pelatihan audit kecurangan diharapkan auditor dapat bertambah pengetahuannya sehingga akan memengaruhi perilaku mereka ketika menjalankan penugasan yang berkaitan dengan kecurangan. Auditor yang diberikan pelatihan mendeteksi kecurangan akan memiliki pengetahuan tentang kecurangan sehingga

kemampuan mendeteksi kecurangan juga akan meningkat (Siti Rahayu dan Gudono, 2016).

2.3.5 Pengaruh Risiko Audit terhadap Tanggung Jawab Auditor dalam Mendeteksi kecurangan

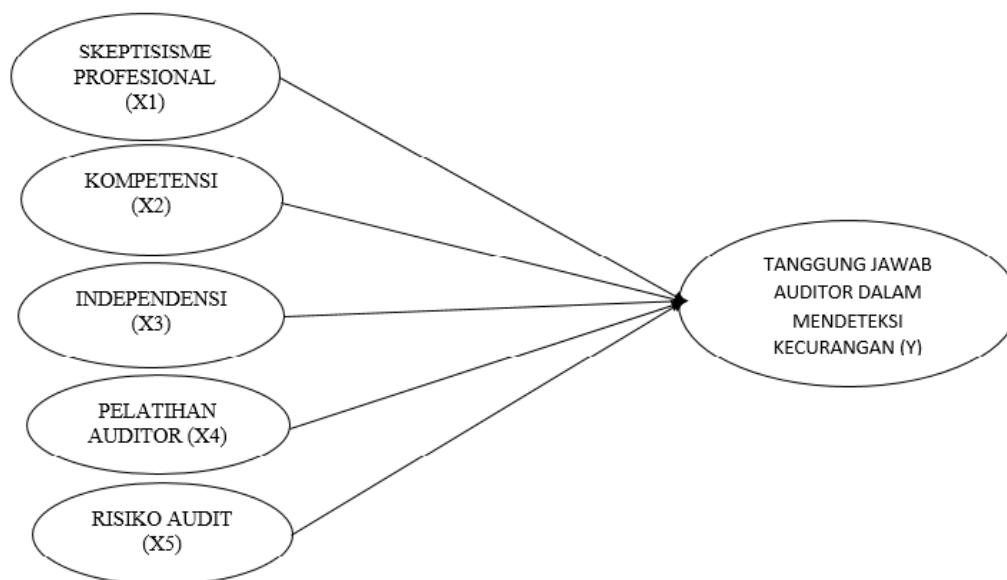
Risiko audit merupakan kerentanan suatu saldo akun atau golongan transaksi terhadap suatu salah saji material, dengan asumsi tidak terdapat kebijakan dan prosedur pengendalian intern yang terkait. Audit tidak menjamin bahwa laporan keuangan telah bebas dari salah saji material, maka terdapat beberapa derajat risiko bahwa laporan keuangan mengandung salah saji yang tidak terdeteksi oleh auditor maka dalam perencanaan pekerjaannya auditor harus mempertimbangkan risiko audit tersebut (Andenna, 2016).

Semakin tinggi risiko yang dihadapi oleh auditor dalam mendeteksi adanya salah saji material maka menuntut ketelitian auditor dalam memeriksa dan mengevaluasi bukti-bukti audit, dengan demikian maka dapat meminimalisir risiko audit yang ada dalam melakukan penugasan audit dengan baik termasuk dalam meningkatkan tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan (Aviani, 2017).

2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini dirancang untuk lebih memahami konsep penelitian dan pengaruh dari hubungan variabel independen dan variabel dependen.

Dari fenomena yang telah dikemukakan, maka dapat dibuat model kerangka pemikiran sebagai berikut:



Sumber: Olahan Peneliti (2018)

Gambar 2.3
Kerangka Pemikiran

Berdasarkan gambar diatas, dapat dijelaskan bahwa penelitian ini menguji pengaruh skeptisisme profesional, independensi, kompetensi, pelatihan auditor, dan risiko audit.

2.5 Hipotesis Penelitian

Atas dasar landasan teori dan model penelitian tersebut, maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

H1: Skeptisisme profesional berpengaruh terhadap tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan

H2: Independensi berpengaruh terhadap tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan

H3: Kompetensi berpengaruh terhadap tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan

H4: Pelatihan auditor berpengaruh terhadap tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan

H5: Risiko audit berpengaruh terhadap tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan

